

PRESS RELEASE

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



Anggota I BPK Serahkan LHP atas LKPD dan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan TA 2021, serta IHPD pada Pemerintah Provinsi Kalbar

Pontianak, 13 Mei 2022 - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran (TA) 2021, serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). LHP tersebut diserahkan oleh Anggota I BPK, **Nyoman Adhi Suryadnyana** kepada Ketua DPRD Provinsi Kalbar, **M. Kebing L** dan Gubernur Kalimantan Barat, **H. Sutarmidji**. Penyerahan tersebut dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kalbar. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Kalbar, **Rahmadi** dan Kepala Auditorat I.B, **Sardjono**. Selain itu, turut pula dalam acara tersebut, para pejabat struktural BPK Kalbar serta tim pemeriksa BPK.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Kalbar atas LKPD Provinsi Kalbar Tahun 2021, yang berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2021 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan keuangan TA 2021 telah didukung dengan SPI yang efektif, sehingga BPK menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 adalah "**Wajar Tanpa Pengecualian**".

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Provinsi Kalbar, BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian, yaitu PKB dan BBNKB atas penjualan kendaraan baru dan 63 kendaraan bermotor milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum dikenakan sebesar Rp1.020.740.950,00, kelebihan pembayaran sebesar Rp1.392.766.497,98 dari kekurangan volume pekerjaan dan selisih harga timpang, serta kekurangan penerimaan sebesar Rp1.808.565.580,35 atas denda yang belum dikenakan dan jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun opininya sudah WTP, namun tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

BPK turut menyerahkan IHPD Tahun 2021 dan LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah

Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalbar

Jl. Ahmad Yani, Pontianak Telp. (0561) 585349 ext. 205

Website: pontianak.bpk.go.id, Email: bpkpontianak@gmail.com

Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Kalbar TA 2021. Pemerintah Provinsi Kalbar telah melakukan upaya-upaya dalam penanggulangan kemiskinan, antara lain Pemerintah Provinsi Kalbar telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi, telah dilakukan perjanjian pemanfaatan data kependudukan antara Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka optimalisasi proses pemadanan data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Kependudukan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyelenggarakan pelatihan kerja bagi lulusan SMK dan SMA serta pencari kerja lainnya selama tahun 2021 dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.

Dengan tidak mengesampingkan capaian tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya, belum memiliki database penduduk miskin yang mutakhir, terverifikasi dan tervalidasi seluruhnya, Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin belum sepenuhnya mendorong peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dan belum sepenuhnya mendorong masyarakat miskin bekerja di sektor formal/informal/berwirausaha, dalam pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin belum sepenuhnya memfasilitasi akses permodalan usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Mengakhiri sambutannya, Anggota I BPK, **Nyoman Adhi Suryadnyana** mengingatkan agar rekomendasi yang diberikan oleh BPK segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Kalimantan Barat beserta jajarannya selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diserahkan sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

SUBBAGIAN HUMAS & TU KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR

Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalbar

Jl. Ahmad Yani, Pontianak Telp. (0561) 585349 ext. 205

Website: pontianak.bpk.go.id, Email: bpkpontianak@gmail.com